

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA , KERANGKA PEMIKIRAN DAN PREPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pemerintahan/Pemerintah

Menurut Surbakti menyatakan istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda makna, Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. (Surbakti, 1992:168).

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa secara sederhana Pemerintah ialah sebuah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya sedangkan pemerintahan merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsi yang dimiliki Pemerintah tersebut.

Sedangkan menurut Bagir Manan definisi pemerintahan dan pemerintah ialah sebagai berikut:

“Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara”. (Manan, 2001:101)

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa Pemerintahan merupakan keseluruhan dari alat-alat negara (eksekutif, legistaf dan yudisial) yang menjalankan tugas dan fungsinya atas nama negara. Kebijakan memiliki berbagai definisi sehingga tidak dapat tergeneralisirkan untuk mendapatkan definisi yang memuaskan. Secara umum kebijakan dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dalam setiap bidangnya. Selanjutnya Dye menyebutkan bahwa *public policy is whatever government choose to do or not to do.* (Dye, 1987:2)

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan setiap hal yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh Pemerintah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan dapat menjadi sebagai suatu sikap Pemerintah.

Selanjutnya definisi kebijakan publik menurut Wilson *public policy is actions, objetive and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen).* (Wilson, 2006:154)

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa kebijakan publik merupakan sebuah tindakan, objektif dan pernyataan pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil (atau gagal dalam pengambilan keputusan) untuk melaksanakannya, dan penjelasan mereka berikan untuk apa yang terjadi (atau tidak terjadi). Pada dasarnya pembentukan suatu kebijakan oleh Pemerintah bertujuan untuk mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan tersebut. Nugroho menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan publik ialah sebagai berikut :

“tujuan dari kebijakan publik ialah :

1. Mendistribusikan sumber daya secara nasional, yang mencakup redistribusi dan absorpsi sumber daya secara nasional.
2. Untuk regulasi, liberalisasi dan deregulasi.
3. Dinamika dan stabilitas.
4. Memperkuat pasar dan negara.” (Nugroho, 2011:57-60)

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari pembuatan kebijakan publik adalah untuk memenuhi segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Namun disisi lain menariknya dalam kehidupan bernegara saat ini, setiap lembaga yang membuat kebijakan bertujuan dengan tidak hanya satu tujuan namun sehingga hal tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan memiliki multi-fungsi dengan berasaskan kebersamaan.

2.1.2 Efektivitas

Efektivitas memiliki berbagai definisi sehingga tidak dapat tergeneralisirkan untuk mendapatkan definisi yang memuaskan. Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki artinya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas disebut juga hasil guna dan efektivitas juga mengarah pada dua kepentingan yaitu secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan untuk mendapatkan masukan tentang produktivitas. Efektivitas merupakan keadaan yang

sangat berpengaruh terhadap suatu hal yang penting, tindakan maupun hal yang berlaku. Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan ketentuan dalam menilai suatu kegiatan dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kegiatan yang sedang dilakukan.

Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas adalah gaya guna, keaktifan serta adanya keberhasilan yang ingin dicapai dalam melaksanakan suatu tugas. Efektivitas berasal dari kata efektif yaitu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diharapkan atau yang telah ditetapkan.

Sedangkan pendapat Adibowo dkk (2014) dalam Mahmudi (2005:92.),
Sebagai berikut :

“efektivitas adalah melaksanakan serangkaian tugas yang sudah ditetapkan pada suatu rencana, dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku sehingga tujuan yang dikehendaki dapat dicapai “

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan berbagai cara dalam mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan oleh individu, kelompok maupun organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang diharapkan mencapai tujuan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku.

Sedangkan secara umum efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang diukur kualitas, kuantitas, dan waktu yang sesuai dengan yang telah di rencanakan. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang tercapai atau telah berhasil maka suatu kegiatan tersebut dianggap efektif. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh

seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

“Efektivitas adalah seberapa bagus pekerjaan yang dilaksanakan, sejauhmana orang-orang menghasilkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat di selesaikan sesuai dengan rencana, baik dalam biaya maupun waktu bisa dikatakan efektif.” Ravianto (2014:11)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat diketahui bahwa efektivitas dari suatu pekerjaan yang mencapai keberhasilan dan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik dari biaya maupun waktu yang di gunakan sehingga semakin banyak rencana yang tercapai maka suatu pekerjaan bisa dikatakan efektif.

“Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.” Dunn(2011)

Berdasarkan pengertian efektivitas menurut Dunn (2011) diatas untuk melihat efektivitas diharuskan ada suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Untuk melihat efektivitas harus adanya tingkat kepuasan dan terciptanya hubungan kerja yang kondusif. Artinya dalam melihat atau mengukur efektivitas harus saling memiliki sebuah tujuan yang dilakukan dengan cara yang baik dan hasil yang baik pula yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi.

2.1.2.1 Kriteria Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program tidak mudah karena dapat dikaji dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Jika di pandang dari sudut pandang produktivitas, maka seseorang atasannya memberikan pemahaman bahwa efektivitas

berarti barang dan jasa. Dapat diukur dengan cara membandingkan antara rencana dengan hasil nyata yang telah di capai.

Namun, jika tindakan yang dilakukan tidak tepat sasaran akan menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka hal ini tidak dikatakan efektif. Mengukur efektivitas menurut S.P Siagian dalam bukunya manajemen moderen (1982:30:33) dalam Suryani (2016) yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak di capai supaya karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran dan tujuan nya.
2. Kejelasan Strategi pencapaian tujuan , strategi ini adalah cara dalam upaya pencapaian suatu sasaran.
3. Proses Analisa dan perumusan kebijaksanaan yang berkaitan dengan tujuan yang ingin di capai dan strategi yang akan digunakan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang pada hakikatnya memutuskan sekarang apa yang dikerjakan dimasa mendatang.
5. Penyusunan program yang tepat , apabila pelaksanaan kurang memiliki pedoman bertidak dalam bekerja itu di sebabkan tidak di jabarkannya rencana pada program pelaksanaan yang tepat.
6. Kemampuan kerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efesien , bagaimana suatu program bila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka suatu organisasi tersebut tidak akan mencapai keberhasilan sesuai dengan sasaran.
8. Sistem pengawasan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan tolak ukur menurut S.P Siagian dalam bukunya manajemen moderen (1982:30:33) dalam Suryani (2016) diatas bahwa dalam mengukur suatu efektivitas dilihat dari delapan indikator agar bisa menilai suatu pekerjaan tersebut efektif atau tidak.

Beberapa tolok ukur atau kriteria efektivitas secara umum sebagai berikut :

- a. Efektivitas Keseluruhan
- b. Produktivitas
- c. Efisiensi
- d. Laba
- e. Pertumbuhan
- f. Stabilitas
- g. Semangat Kerja
- h. Kepuasan Kerja
- i. Penerimaan Tujuan Organisasi
- j. Integrasi
- k. Fleksibilitas Adaptasi
- l. Penilaian Pihak Eksternal

Berdasarkan tolok ukur diatas dapat dikatakan bahwa mengukur suatu efektivitas bisa dilihat dari kepuasan kerja, semangat kerja dan penilaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut.

Selanjutnya mengukur efektivitas menurut Budiani (2007) yaitu mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel seperti di bawah ini :

1. Ketetapan Sasaran Program yaitu sejauhmana keberhasilan peserta program sesuai dengan tepat sasaran yang telah ditentukan.
2. Sosialisasi Program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai
3. pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
4. Pencapaian Tujuan Program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil dengan tujuan program yang telah ditetapkan.
5. Pemantauan Program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian terhadap peserta program.

Sedangkan pengukuran efektivitas menurut Cambel J.P, (2011) pengukuran efektivitas adalah Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat *output* dan *Input* dan Pencapaian Program.

Berdasarkan beberapa pengukuran efektivitas program diatas, maka peneliti menggunakan variabel-variabel untuk mengukur efektivitas menurut Budiani karena teori tersebut cocok untuk mengetahui ukuran Efektivitas Program Pemuktahiran Data Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

2.1.2.2 Pendekatan Terhadap Efektivitas

Pendekatan terhadap efektivitas ini berguna untuk mnegukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang ingin dicapai dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai oleh lembaga tersebut. Dalam hal ini ada 3 pendekatan yang digunakan dalam mengukur efektifitas yaitu :

1. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*) pendekatan ini mengukur sejauhmana suatu lembaga berhasil mewujudkan tepat sasaran yang ingin dicapai. Pendekatan ini dimulai dengan identifikasi sasaran suatu organisasi dan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi tersebut dalam mencapai sasaran yang diinginkan tersebut.
2. Sasaran yang realistis sangat diperhatikan dalam pengukuran efektifitas agar memberikan hasil yang maksimal berdasarkan sasaran yang sah dengan memperhatikan masalah yang ada,dengan

memusatkan perhatian terhadap *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan suatu program dalam mencapai *output* yang diinginkan. Pendekatan ini mengukur sejauhmana organisasi berhasil mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

3. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*) pendekatan ini mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga atau organisasi untuk mendapatkan berbagai macam potensi yang akan dibutuhkan. Suatu organisasi atau lembaga harus bisa mendapatkan berbagai macam potensi dan memelihara keadaan dan sistem agar bisa menjadi efektif.
4. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga atau organisasi terhadap sekitar, karena organisasi atau lembaga memiliki hubungan yang sama dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan mendapatkan potensi-potensi yang terdapat pada lingkungan sering kali bersifat langka.
5. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*) pendekatan ini adalah sebagai efisiensi kondisi kesehatan dari suatu organisasi atau lembaga *internal*. Pada lembaga yang efektif , proses *internal* ini berjalan dengan lancar. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi atau lembaga.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa efektivitas adalah menggambarkan secara keseluruhan terhadap siklus *input* , proses dan *output* yang dilihat dari hasil guna dari pada organisasi , program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan tersebut serta berhasil tidaknya organisasi mencapai tergetnya.

2.1.2.3 Tingkatan Efektivitas

Penilaian pada tingkat kesesuaian program adalah salah satu cara untuk mengukur efektivitas suatu program dalam mencapai suatu keberhasilan yang di inginkan. Adapun tingkatan efektivitas Menurut David j. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997 : 25- 26) sebagai berikut :

- a. Efektivitas individu
Efektivitas individu adalah efektivitas yang di nilai secara individu dalam menilai hasil dari karyawan, anggota serta organisasi.
- b. Efektivitas Kelompok
Efektivitas kelompok adalah eefektivitas yang saling bekerja sama antara individu dengan kelompok atau kontribusi dari semua anggota kelompok.
- c. Efektivitas Organisasi
Efektivitas organisasi ini terdiri dari individu dan kelompok yang melalui pengaruh sinergitas sehingga organisasi mampu mencapai hasil yang lebih baik tingkatan nya dari pada jumlah hasil tiap-tiap bagiannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa tingkatan efektivitas digunakan dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan berdasarkan keberhasilan individu, kelompok maupun organisasi agar

kelompok yang berkontribusi bekerja sama hingga mencapai hasil yang lebih baik.

2.1.3 Efektivitas Program

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan *ouput* program (Ditjen Binlantas Depnaker, dalam setiawan, 1998). Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh kertpatrick yang dikutip oleh casio (1995) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa efektivitas program dapat diketahui apabila ada perbandingan antara tujuan dengan hasil yang dicapai dan peserta dalam penerapan program tersebut dapat dijadikan penentu dalam keberhasilan yang di dapat kan.

Efektivitas program adalah suatu penelitian terhadap sejauhmana kegiatan program yang dilakukan dapat berhasil mencapai sesuai dengan tujuan program tersebut. Keberhasilan suatu program, dapat dinilai dari seberapa efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan oleh

organisasi terkait. Definisi efektivitas menurut Menurut Julia (2010:26)

adalah sebagai berikut :

“Efektivitas program dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauhmana sasaran program yang telah dilakukan.”

Berdasarkan uraian diatas dapat di ketehai bahwa efektivitas suatu program memiliki tingkatan dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Subagyo (2000) adalah sebagai berikut :

“Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan *ouput* dengan tujuan program dan pendapat peserta program dapat di jadikan sebagai ukuran menentukan efektivitas suatu program.”

Penilaian pada tingkat kesesuaian program adalah salah satu cara untuk mengukur efektivitas suatu program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan antara tujuan program dengan hasil yang di capai. Ditjen Bilantas (2010) dalam series,(2014). Sementara itu pendapatan program dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan efektivitas suatu program. Hal ini dinyatakan oleh Kerprick yang dikutip oleh Cascio (2013) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang dilakukan.

Dari paparan diatas dapat di ketahui bahwa dalam menilai efektivitas suatu program harus ada suatu perbandingan antara *output* dan *input* . Untuk menilai efektivitas harus ada tingkat kepuasan dan terciptanya hubungan kerja

yang kondusif. Efektivitas bisa di lihat dari pencapaian suatu tujuan yang dilakukan dengan cara yang baik dan hasil yang baik.

2.1.3.1 Pengertian Program

Kata program berasal dari bahasa Inggris yaitu “ *progrmae* ” yang memiliki arti rencana atau cara sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan di jalankan oleh seseorang individu, kelompok, atau organisasi tertentu. Dalam hal ini program adalah bagian dari suatu perencanaan. Program sering pula diartikan sebagai kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan. Agar lebih memahami mengenai pengertian program, berikut ini beberapa pengertian menurut para ahli yaitu :

“Program adalah suatu rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan sistematis.”Sugiyono (2005:21)

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa program merupakan rancangan dalam suatu pekerjaan yang dibuat dengan menggunakan teknologi. Sehingga suatu program bisa dilaksanakan menggunakan komputer dan instruksinya menggunakan bahasa komputer.

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu

kegiatan. Untuk lebih memahami mengenai pengertian program, berikut ini akan dikemukakan definisi oleh beberapa ahli:

Pariata Westra dkk. (1989:236) mengatakan bahwa :

“Program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya”
Sondang P. Siagian (2006:1:17)

“Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan”

Berdasarkan uraian beberapa diatas dapat diketahui bahwa suatu program merupakan perincian suatu rencana yang akan diterapkan dalam mengerjakan sesuatu atau bisa dikatakan sebuah petunjuk dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan.

2.1.4 Pemuktakhiran Data

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, pemuktakhiran data menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini merujuk pada pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 bahwa pemuktakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga pemuktakhiran data ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan secara berjenjang dari tingkat Desa.

Selanjutnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Pasal 5 (1) Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan tahapan :

- a. Penyusunan daftar awal sasaran;
- b. Bimbingan teknis;
- c. Musyawarah Desa/Kelurahan>Nama Lain;
- d. Kunjungan ke Rumah Tangga;
- e. Pengolahan data;
- f. Pengawasan dan pemeriksaan; dan
- g. Pelaporan.

Suatu sistem dapat membantu dalam menjamin program pemuktakhiran data sehingga data yang menjadi terverifikasi dan tervalidasi sehingga bisa membantu penurunan angka kemiskinan. Sistem informasi mengelola data menjadi data yang transparan dan memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan bantuan sosial ataupun subsidi menjadi tepat sasaran.

Pemuktakhiran data dilakukan sedikitnya satu tahun sekali dalam melakukan pemuktakhiran data dilakukan secara berjenjang dari tingkat Desa hingga ke Menteri Sosial agar data yang di dapatkan dilapangan selanjutnya

ditetapkan oleh Menteri Sosial sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan setiap jenis bantuan yang ada.

Pemuktakhiran data dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data masyarakat miskin penerima bantuan sosial seperti perubahan tempat tinggal, kematian, perubahan ekonomi maupun menikah/cerai diharapkan data masyarakat miskin menjadi data yang akurat dan bantuan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam penganan fakir miskin pemuktakhiran data melalui suatu sistem sangat berpengaruh agar bantuan sosial menjadi tepat sasaran dan data masyarakat miskin terjamin keakuratan nya.

2.1.5 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang-orang ataupun bagi penggunanya. Sistem informasi melalui interaksi antara orang, proses, data, dan teknologi dalam mendukung operasi suatu organisasi. Sistem informasi Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

“Secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.” (Lucas, 1987 : 5)

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa sistem merupakan komponen yang terorganisasi yang saling tergantung satu sama lain , saling berinteraksi dan saling terorganisasi.

“Sistem informasi adalah kombinasi antara manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat.” (John F.Nash,1995:8)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi antara manusia dengan alat teknologi untuk mengelola data yang telah direncanakan oleh suatu organisasi agar mencapai tujuan yang di inginkan dan menemukan solusi dalam mempermudah suatu pekerjaan ataupun program yang sedang dilaksanakan.

“Sistem informasi adalah yang dilakukan atau diselenggarakan untuk mengumpulkan, memasukan, mengegolah dan menyimpan data yang terorganisir agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.” (Rommey, 1997:16)

Selanjutnya Mulyanto (2017) menyatakan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan beberapa komponen sistem yaitu *software*, *hadrware* dan *brainware* yang memproses informasi menjadi sebuah *output* yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam suatu sistem informasi terdapat beberapa komponen agar menghasilkan sebuah hasil yang mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya oleh organisasi.

2.1.6 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi atau keadaan yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara didalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar warga negara tersebut dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga Warga Negara bisa melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat negara agar mendapatkan kehidupan yang layak dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini adalah bagian dari upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap masyarakat yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Sedangkan Badan Pusat Statistik dalam publikasi data dan informasi kemiskinan (2009) kesejahteraan sosial adalah kesejahteraan yang meliputi bidang kehidupan yang sangat luas dan aspeknya tidak bisa diukur. Kesejahteraan dalam konsep dunia *modern* yaitu suatu kondisi dimana individu dapat memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makanan,

pakaian, tempat tinggal yang layak, air bersih dan berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan pekerjaan yang memadai sehingga dapat menunjang kualitas kehidupan dan memiliki status sosial yang sama terhadap sesama.

“Kesejahteraan Sosial terdiri dari tiga unsur yaitu : pertama , setinggi apa masalah sosial yang di kuasai, kedua , sebanyak apa kebutuhan terpenuhi , dan yang ketiga , setinggi apa kesempatan untuk maju. Tiga unsur tersebut berlaku bagi individu, kelompok maupun organisasi dan seluruh masyarakat.” Midgley dalam Suud (2006:5)

Dengan ini maka, kesejahteraan sosial bisa dikatakan sebagai kegiatan yang terorganisasikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial, melalui pemberian bantuan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesejahteraan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar kehidupan dan hubungan sosial.

kesejahteraan sosial adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu, lembaga sosial , masyarakat maupun badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial atau tunjangan sosial. Suharto (2006:3)

Berdasarkan dua pengertian diatas dapat di katakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial, material, dan ekonomi warga negara tanpa terkecuali berlaku bagi setiap individu, kelompok maupun organisasi melalui pemberian pelayanan sosial atau tunjangan sosial dari Pemerintah agar dapat hidup dengan layak dan terpenuhinya kebutuhan dasar.

2.1.6.1 Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Secara sederhana pemberdayaan masyarakat senantiasa melakukan pendekatan sosial agar masyarakat miskin merasakan sentuhan berbagai macam jenis bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah. Terdapat berbagai pendapat mengenai pendekatan kesejahteraan sosial tersebut. Menurut Midgley ada empat pendekatan dalam mengatasi kesejahteraan sosial yaitu :

- 1) Filantropi sosial berkaitan erat dengan upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pendeta atau relawan dimana mereka ini menyumbangkan waktu, uang dan tenaga untuk membantu orang lain . Pelaku ini dikenal sebagai filantropi filantropis.
Ada empat karakteristik filantropi sosial yaitu :
 - a. Amal
 - b. Penerima pasif
 - c. Acak
 - d. Kemauan
- 2) Pekerja Sosial yaitu pendekatan yang dilakukan secara terorganisasi untuk mempromosikan tentang kesejahteraan sosial dengan menggunakan profesional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial .
- 3) Administrasi Sosial adalah pendekatan sosial yang berusaha mempromosikan dengan cara menciptakan program sosial pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pelayanan sosial. Pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah.
- 4) Pembangunan Sosial adalah proses yang terencana dalam perubahan sosial yang di susun untuk meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, dimana dilakukan proses dinamis pembangunan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam melakukan pendekatan kesejahteraan sosial harus dilakukan untuk memperkenalkan

program yang telah diterapkan oleh Pemerintah dalam menangani masalah sosial masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat miskin secara keseluruhan agar dapat hidup dengan layak.

2.1.6.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk dapat mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok, dan masyarakat dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan mengurangi tekanan dan goncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan dari sistem kesejahteraan sosial yang tercemin dalam semua program kesejahteraan sosial menurut Leonar Schneiderman terdapat tiga tujuan kesejahteraan sosial yaitu sebagai berikut :

- a. *System Maintenance* , tujuan dari sistem ini adalah meliputi pemeliharaan dan menjaga kesinambungan keberadaan nilai sosial dan tatanan nilai sosial.
- b. *System Control* , tujuan dari sistem ini adalah melakukan kontrol secara efektif terhadap perilaku yang menyimpang dari nilai sosial yang ada.
- c. *System Change* , tujuan dari sistem ini adalah melakukan perubahan secara efektif bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan tujuan menurut ahli diatas dapat dikatakan bahwa tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk mengontrol, memelihara dan melakukan perubahan terhadap suatu program kesejahteraan sosial agar tidak menyimpang dari nilai sosial yang ada. Ada pula tiga tujuan kesejahteraan sosial menurut Schneiderman (1972) dalam fahrudin (2012:10) yaitu :

- a. Pemeliharaan Sistem yaitu memelihara dan menjaga kelangsungan nilai dan norma sosial serta aturan kemasyarakatan termasuk hal yang berkaitan dengan makna dan tujuan hidup bagi kelangsungan hidup secara individu ataupun kelompok .
- b. Pengawasan Sistem yaitu pengawasan yang dilakukan secara efektif terhadap perilaku yang menyimpang dari nilai sosial yang ada. Tujuan ini meliputi fungsi pemeliharaan yang berupa sosialisasi , dan peningkatan mendapatkan fasilitas bagi golongan masyarakat yang menyimpang dari nilai sosial.
- c. Perubahan Sistem yaitu melakukan perubahan secara efektif dan perubahan ini merupakan instrumen untuk mengatasi hambatan terhadap partisipasi dan bersikap adil terhadap anggota masyarakat dalam mengambil keputusan.

2.1.6.3 Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Penyelenggara kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah beserta masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat (Undang-Undang No 11 Tahun 2009) yaitu meliputi :

1. Rehabilitas (pasal 7) yaitu untuk mengembangkan kemampuan individu yang mengalami masalah sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial sebagaimana mestinya dan rehabilitas ini dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif , baik dalam keluarga maupun masyarakat (ayat 1).
2. Jaminan Sosial (pasal 9) yaitu untuk menjamin anak fakir miskin , anak yatim , terlanatar , cacat fisik , cacat mental yang mengalami masalah ekonomi agar mendapatkan kebutuhan dasar yang terpenuhi.
3. Ansuransi (Pasal 10) yaitu ansuransi kesejahteraan sosial di selenggarakan untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu agar bisa mempertahankan taraf kesjahteraan sosial nya yang diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah.
4. Pemberdayaan Sosial (Pasal 12) yaitu memberdayakan individu, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar

- terpenuhi kebutuhan secara mandiri dan meningkatkan peran lembaga atau individu sebagai sumber dalam penyelenggaraan sosial.
5. Perlindungan Sosial (Pasal 14) yaitu untuk menangani resiko dari masalah sosial individu, kelompok ataupun organisasi melalui bantuan sosial , advokasi sosial dan bantuan hukum.
 6. Bantuan Sosial (Pasal 15) yaitu bantuan yang diberikan kepada individu , kelompok atau masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mendapatkan bantuan langsung dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa penyelenggara dalam kesejahteraan sosial seluruh masyarakat miskin dilakukan oleh Pemerintah dari tingkat Desa hingga ke Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan agar kesejahteraan sosial berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan yaitu masyarakat miskin di daerah terpencil pun mendapatkan kehidupan yang layak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Efektivitas program adalah suatu penelitian terhadap sejauhmana kegiatan program yang dilakukan dapat berhasil mencapai sesuai dengan tujuan program tersebut. Keberhasilan suatu program, dapat dinilai dari seberapa efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan oleh suatu organisasi.

Program pemuktakhiran data melalui sistem informasi kesejahteraan sosial *next generation* (SIKS-NG) dilakukan oleh sumber kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Jadi Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan secara langsung, Kementerian Sosial ini

bertugas untuk menetapkan data yang proses pemuktakhiran data nya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pemuktakhiran data tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

Program pemuktakhiran data melalui sistem informasi kesejahteraan sosial *next generation* (SIKS-NG) ini bisa di katakan efektif jika Pemerintah Daerah khususnya di Lembaga Dinas Sosial melaksanakan program tersebut dengan baik sesuai dengan pengertian dan tolak ukur dalam efektivitas suatu program.

Untuk dapat menilai sejauhmana efektivitas sistem ini dalam membantu program pemuktakhiran data , perlu ada kriteria yang menunjukan apakah program yang diterapkan dapat dikatakan bermanfaat atau tidak , baik atau tidak . Program dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpecahya tanpa ada kekeliruan dalam proses pendataan sesuai dengan target yang direncanakan oleh Dinas Sosial dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Selanjutnya peneliti mengukur efektivitas suatu program menggunakan teori menurut Budiani (2007) yaitu mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel seperti di bawah ini :

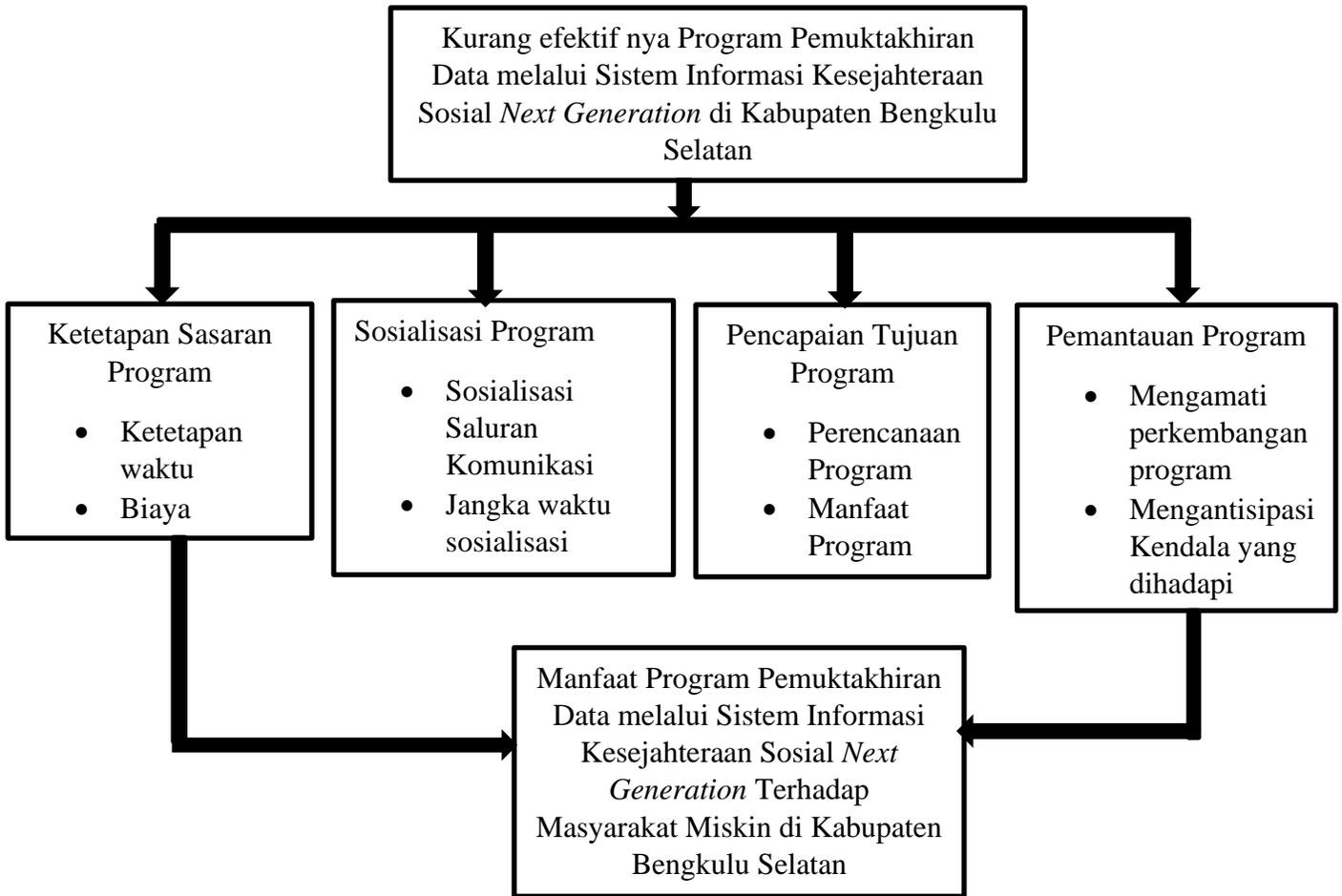
1. Ketetapan sasaran program adalah keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melakukan program Pemuktakhiran Data melalui SIKS-NG sesuai dengan ketetapan waktu dan biaya yang dikeluarkan.

2. Sosialisasi program adalah kemampuan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melakukan sosialisasi program melalui saluran komunikasi berupa media komunikasi dan media informasi dan jangka waktu dalam mengsosialisasikan program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada Operator SIKS-NG yang ada di Kecamatan maupun di Desa dalam melaksanakan program yang dilakukan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial *next generation* (SIKS-NG).
3. Pencapaian tujuan program adalah kesesuaian antara perencanaan, dan manfaat program pemuktahiran data yang dilakukan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial *next generation* (SIKS-NG) dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program adalah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program yang dilakukan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial *next generation* (SIKS-NG) dengan mengantisipasi kendala yang dihadapi dan mengamati perkembangan program yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran



(Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2021)

2.3 Preposisi

Berdasarkan uraian diatas maka preposisi penelitian ini adalah Efektivitas Program Pemuktakhiran Data melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* di Kabupaten Bengkulu Selatan diukur dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program.